

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman saat ini yang semua serba memanfaatkan teknologi, terlebih saat ini dunia memasuki era *Society 5.0*, Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. *Artificial Intelligence (AI)*, *Robot*, *Internet of Things (IoT)* adalah pendorong utama transformasi digital, yang memberikan dunia cara hidup dan menjalankan bisnis yang lebih baik. *Society 5.0* sendiri baru saja digagas 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0.

Konsep revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep *society* lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sedangkan *Society 5.0* menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dalam *Society 5.0* di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas dari orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut guna mendukung operasi serta manajemen. Apabila diartikan secara luas, istilah dari sistem informasi sering digunakan untuk merujuk pada interaksi yang terjadi di antara orang, proses algoritmik, teknologi serta data.

Pemerintah saat ini sedang melakukan proses pembangunan yang lebih baik, menuju pemerintahan yang *good governance*. Pemerintah harus

transparan dan akuntabel untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Good governance* memiliki karakteristik khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan awal diterapkannya *good governance*. Konsep *good governance* memiliki hubungan satu dengan lainnya, hubungan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai dilayani, sehingga ketika terciptanya hubungan tersebut maka adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Ada sembilan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance principles*), yang selama ini menjadi acuan berbagai literatur, yaitu :

1. Asas kecermatan formal
2. *Fairplay*
3. Perimbangan
4. Kepastian hukum formal
5. Kepastian hukum material
6. Kepercayaan
7. Persamaan
8. Kecermatan
9. Asas keseimbangan

Secara umum, kesembilan asas tersebut dalam konteks *good governance* dapat disarikan menjadi tiga hal, yaitu: akuntabilitas publik, kepastian hukum (*rule of law*), dan transparansi publik. Salah satunya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan.

Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melaksanakan Rencana Awal RKPD. Semua usulan kegiatan akan ditampung dan dipilah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta anggaran yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam

perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah.

Konsep *e-government* bukanlah inisiatif yang sederhana dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah besar sumber daya, perlu untuk memahami keadaan yang menyebabkan (atau tidak) untuk mengimplementasikan inisiatif *e-government*. *E-Government* muncul sebagai alat teknologi informasi dengan manfaat potensial bagi pemerintah, bisnis, dan warga negara, termasuk penghematan biaya, peningkatan komunikasi dan koordinasi di dalam dan antar organisasi, perluasan partisipasi warga, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah (Ashaye & Irani, 2019). Perkembangan teknologi berupa internet memunculkan istilah *e-government*, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi. (Adiputra et al., 2018). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor publik sering disebut *e-government*. Inisiatif seperti itu sering menjanjikan untuk mengubah layanan pemerintah dan meningkatkan efisiensi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa adopsi TIK untuk tujuan pemerintah dikaitkan dengan tingkat kegagalan yang tinggi (Sundberg & Larsson, 2017). *E-government* bukanlah obat atau jalan pintas menuju peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang pesat secara signifikan, mencapai kinerja pemerintah yang efisien dalam jangka pendek, atau membangun mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. *E-Government* merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan tersebut.

E-Government tidak dapat dibangun dan diimplementasikan hanya dengan merumuskan peraturan dan kebijakan pemerintah dan *governance*, diperlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma menuju transformasi proses (proses bisnis) yang beroperasi di dalam pemerintahan. Salah satu implementasi *e-government* dan juga penerapan aktual basis adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah amanat dari

UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan sekaligus mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan Informasi yang akurat serta dapat di pertanggungjawabkan. Salah satu negara yang menjadi tolok ukur penerapan akuntansi basis akrual adalah Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru menerapkan akuntansi basis akrual setelah resesi ekonomi negara dan akumulasi hutang nasional yang menggunung. (Yuliati et al., 2019). Reformasi pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan mekanisme penganggaran yang lebih fleksibel yang dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas (Arsallya et al., 2021).

Di Indonesia mengharuskan penerapan akuntansi akrual penuh dan akuntansi akrual tunai akan dihapuskan untuk pemerintah pusat dan daerah selambat-lambatnya pada tahun 2015 tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sistem akrual digunakan bersamaan dengan sistem akuntansi berbasis kas karena anggarannya masih berbasis kas (Sylvia et al., 2018). SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing

instansi pemerintah. Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik (Wurara et al., 2020)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan selama tahun 2021. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam menjalankan tugas tersebut maka Dinas Tenaga Kerja memiliki Visi yaitu Wonogiri Kerja, Kompeten, Produktif, dan Melindungi. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

- A. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- B. Meningkatkan kesempatan kerja
- C. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan
- D. Meningkatkan minat bertransmigrasi
- E. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Perangkat Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Wonogiri. Renja Perangkat Daerah juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan RPJMD. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan

Fenomena yang muncul pada penerapan SIPD adalah masalah penggajian serta penyusunan seluruh tata kelola keuangan, baik RKPD maupun APBD. Memasuki tahun 2021 banyak terjadi masalah pada SIPD dalam proses penyusunan APBD. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan daerah dalam menggunakan sistem ini. Akibatnya, daerah dilematis dan bingung, sehingga pembayaran gaji terlambat dan eksekusi pada beberapa proyek serta kegiatan-kegiatan juga mengalami kendala dan terhambat. (<http://media.alkhairaat.id/apeksi-ungkap-kendala-penerapan-sipd/>, 2023).

Berdasarkan penjelasan data di atas, maka peneliti tertarik meneliti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Wonogiri. Beberapa hal yang menjadi permasalahan umum di dalam pengelolaan pemerintahan antara lain data-data pembangunan tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah, perencanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat, perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran, data perencanaan dan data penganggaran tidak saling terhubung, jumlah variasi aplikasi perencanaan dan keuangan terlalu banyak dan berbeda-beda di setiap daerah sehingga sulit untuk diintegrasikan, tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan peraturan terkini (Permendagri No 90 Tahun 2019), sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik, beragamnya variasi kodifikasi program kegiatan dan kode rekening pada level Pemerintah Daerah yang mempersulit agregasi data menjadikan urgensi penerapan SIPD untuk pengelolaan keuangan maupun perencanaan daerah.

Penggunaan SIPD juga sebagai wujud transparansi pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi kepada publik. Sistem informasi yang berbasis web dinilai sangat tepat untuk mendukung menuju *good governance* pemerintah daerah. Berfokus pada situs web resmi pemerintah daerah untuk menilai transparansi berarti bahwa situs tersebut adalah teknologi berbasis Internet yang paling mudah diakses, andal, dan tahan lama untuk penyampaian informasi pemerintah secara tepat waktu

(Tavares & da Cruz, 2020). Efek positif dari penerapan website pemerintah juga dibarengi dengan efek negatif yaitu potensi masalah yang terkait dengan penggunaan teknologi digital yang meluas, terutama dalam domain keamanan dan privasi (Vial, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfani & Nasution (2022) menyatakan SIPD merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut menghasilkan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Jelas bahwa pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat, meskipun 60-70% pengguna sistem masih belum memahami input dengan jelas, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih.

Selanjutnya penelitian Andhayani (2020) yang lebih detail meneliti dalam pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah dalam hal *e-budgeting* dari awal rancangan, pelaksanaan telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan untuk perbaikan, namun sangat dibutuhkan: sumber daya manusia yang menangani *e-budgeting*; dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Berbagai penelitian telah membahas mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai OPD di Indonesia, namun belum ada yang meneliti dengan menggunakan model *root causes analysis* penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya *novelty* ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah mengapa dalam penerapan SIPD kurang maksimal hingga kemudian menemukan solusi untuk menangani masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka, *Research gap* dengan penelitian terdahulu adalah belum adanya penelitian mengenai sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia di Kabupaten Wonogiri khususnya di Dinas Tenaga Kerja. Maka dari itu penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dengan memberikan hasil analisis terhadap di terapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada sistem infomasi pemerintahan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang di peroleh oleh peneliti. Selain itu hasil penelitian ini dapat di jadikan rekomendasi terhadap stakeholders seperti pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan

kelompok *civil society* sebagai bahan tinjauan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Selanjutnya diharapkan pemerintah daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama dapat menjadikan penelitian ini sebagai studi banding.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I yakni Pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah berusaha mengungkapkan kronologi munculnya problem penerapan SIPD dan diyakini bahwa problem tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi pertanyaan utama yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini.

Selanjutnya dalam tujuan dan manfaat penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta manfaat yang akan diambil darinya. Bab ini diakhiri dengan sistematika penelitian tesis yang berupa struktur pengorganisasian penulisan tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab-sub bab. Dimaksudkan dari sistematika penelitian tesis ini dapat diketahui alur logika pembahasan secara jelas.

Bab II berisi Landasan Teori. Bab ini menguraikan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini. Ada lima yang digunakan yakni teori tentang rencana kegiatan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menganalisis tentang langkah awal perencanaan kegiatan di Kabupaten Wonogiri, teori SIPD yang akan menjelaskan bahwa SIPD adalah aplikasi umum yang dirancang untuk perencanaan hingga pelaporan sistem informasi pemerintahan daerah yang dipergunakan secara nasional dan sudah diatur

oleh Kemendagri. Teori transparansi yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan informasi yang akurat, dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teori *good governance* yang dipergunakan untuk menganalisis sistem informasi pemerintah daerah sebagai *support system* dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *Good governance*. Teori tentang *root causes analysis* model *5 why's analysis* yang dipergunakan dalam rangka menganalisis akar masalah penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dalam implementasi SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

Bab III berisi metode penelitian dalam implementasi SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.. Pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni sub bab tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV dalam tesis ini berisi hasil penelitian dan pembahasan implementasi SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Dalam bab ini dilakukan pembahasan terhadap data tentang SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Isi terkait dengan implementasi SIPD diantaranya berkaitan dengan permasalahan aplikasi, komunikasi dan juga sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis ini ialah bab kelima yakni penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini juga akan memberikan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini akan menjadi pemahaman dan kajian lebih lanjut dalam rangka perbaikan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara di bagian akhir penulisan ini dilampirkan daftar pustaka, lampiran-lampiran data penelitian.